



**FUNGSI PENGAWASAN DPRD**  
( Studi Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Antara Kepentingan Partai  
Politik dan Kepentingan Publik pada DPRD Provinsi Riau )

***DPRD SUPERVISION FUNCTION***  
(*The Study Of Interest Conflic Management Between The Political Parties Interests  
and Public Interest In The Provincial Parliament Riau*)

**TESIS**

**MAGISTER ILMU ADMINISTRASI**

Oleh  
Mar Syahid  
NIM: 080920101009

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI  
KONSENTRASI ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2011**



## **FUNGSI PENGAWASAN DPRD**

( Studi Tentang Pengelolaan Dilema Antara Kepentingan Partai Politik dan  
Kepentingan Publik pada DPRD Provinsi Riau )

### ***DPRD SUPERVISION FUNCTION***

*(The Study Of Interest Conflic Management Between The Political Parties Interests  
and Public Interest In The Provincial Parliament Riau)*

## **TESIS**

### **MAGISTER ILMU ADMINISTRASI**

Oleh

Mar Syahid

NIM: 080920101009

Pembimbing Tesis

Prof. Dr. Akhmad Khusyairi, MA (DPU)

Dr. Sasongko, M.Si (DPA)

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI  
KONSENTRASI ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2011**

## PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya tulis tesis ini untuk :

1. Orang tuaku ( Bapak H. Kadis, SIP dan Ibu Hj. Muktinah) yang telah membimbingku menjadi manusia yang selalu bisa bersyukur terhadap apa yang didapat serta menjadi manusia yang bisa bermanfaat bagi manusia yang lain sesuai kodrat manusia seutuhnya.
2. Istriku yang juga masih study di Universitas Jember Getir pahit telah dirasakan bersama, menjadi bagian dari diriku putriku tersayang Selly silvia bintang.
3. Almamater Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

## MOTTO

Allah akan meninggikan orang – orang yang beriman diantara kamu dan

orang – orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat

( Terjemahan Surat *Al-Mujadalah ayat 11*)\*

Tiada suatu usaha yang besar akan berhasil tanpa dimulai dari usaha yang

Kecil.\*\*

\*) Deparemen Agama RepubliK Indonesia. 1998.*al Quran dan terjemahannya*.  
Semarang : PT Kumundasmoro Grafindu

\*\*\*)Joeniarto, 1967 dalam Mulyono , E. 1998. *Beberapa Permasalahan Implementasi  
Konvensi Keanekaragaman Hayati dalam Pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri*.  
Tesis Magister

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mar Syahid

NIM : 080920101009

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Fungsi Pengawasan DPRD (Studi Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Antara Kepentingan Partai Politik dan Kepentingan Publik pada DPRD Provinsi Riau)” adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Februari 2011

Yang menyatakan,

Mar Syahid  
NIM : 080920101009

**TESIS**

**FUNGSI PENGAWASAN DPRD  
( Studi Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Antara Kepentingan Partai  
Politik dan Kepentingan Publik pada DPRD Provinsi Riau )**

Oleh

Mar Syahid  
NIM 080920101009

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Akhmad Khusayri, MA.  
NIP 19401215 196501 1 001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Sasongko, M.Si  
NIP 19570407 198609

## PENGESAHAN

Tesis berjudul “Fungsi Pengawasan DPRD (Studi Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Antara Kepentingan Partai Politik dan Kepentingan Publik pada DPRD Provinsi Riau)” telah di uji dan disahkan pada :

Hari, tanggal : Jum’at, 02 Februari 2011

Tempat : Ruang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Prof. Dr. Akhmad Khusayri, M.A.  
NIP 19401215 196501 1 001

Anggota I,

Anggota II,

Dr. Sasongko, M.Si  
NIP19570407 198609

Dr. A. Kholiq Azhari, M.Si  
NIP19560726 198902 1001

Mengetahui/Menyetujui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi,

Prof. Dr. Kabul Santoso, M.S.  
NIP : 19430714 1970081 001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.  
NIP. 19520727 198103 1 003

## RINGKASAN

**FUNGSI PENGAWASAN DPRD (Studi Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Antara Kepentingan Partai Politik dan Kepentingan Publik pada DPRD Provinsi Riau)”** Mar Syahid, 080920101009: 2011: 147 Halaman : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dengan adanya otonomi daerah, peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Daerah akan semakin otonom dan berdaya. Namun, sebagai tempat berkumpulnya para wakil partai politik, DPRD dalam memperjuangkan kepentingan publik terkadang masih banyak diwarnai oleh kepentingan partai politik, sehingga membuat kinerja DPRD kurang optimal. Berkaitan dengan adanya kepentingan publik dan kepentingan partai politik yang melingkupi anggota DPRD, maka penelitian ini memfokuskan pada pengelolaan dilema antara kepentingan publik dan kepentingan partai politik. Lokasi penelitian adalah DPRD Provinsi Riau. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan deskriptif – kualitatif.

Berdasarkan temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa : (1) Alat kelengkapan DPRD Provinsi Riau pada umumnya telah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Namun ada beberapa yang masih kurang optimal, yaitu Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, dan Panitia Anggaran; (2) Mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Provinsi Riau kurang sesuai dengan agenda, karena ada beberapa agenda yang kadang berbenturan. Prosedur pelaksanaan pelaksanaan lebih bersifat administratif terhadap surat – surat masuk, dan belum memiliki pedoman yang baku untuk pelaksanaan pengawasan secara umum; (3) Kemampuan anggota DPRD Provinsi Riau dalam mengartikulasikan kepentingan publik terkadang banyak disebabkan keterpaksaan, karena masalah tersebut telah diberitakan secara intensif oleh pers atau didesak oleh publik melalui unjuk rasa (demo); (4) Kemampuan anggota DPRD Provinsi Riau dalam mengartikulasikan kepentingan sudah cukup baik, karena adanya koordinasi dengan pengurus fraksi dan parpol. Hanya saja adanya pengawasan dari fraksi dan parpol ini terkadang membuat kinerja anggota dewan agak lambat, karena hati – hati takut salah; (5) Kemampuan anggota DPRD Provinsi Riau dalam mengelola Konflik kepentingan antara kepentingan partai politik dan kepentingan publik secara umum dapat dikatakan cukup. Anggota dewan mampu mendahulukan kepentingan yang lebih tinggi di atas kepentingan kelompok. Anggota dewan mendahulukan kepentingan publik (negara) diatas kepentingan parpol dan kepentingan individu. Pada umumnya mereka berusaha bekerja secara proporsional, namun demikian ada juga yang lebih mementingkan kepentingan parpol, absen saat melakukan fungsi pengawasan (kunjungan kerja) karena lokasi/masyarakatnya bukan konstituennya.

*Kata kunci : DPRD, Kepentingan Publik, dan Kepentingan Partai Politik*



## SUMMARY

***DPRD SUPERVISION FUNCTION (The Study Of Interest Conflic Management Between The Political Parties Interests and Public Interest In The Provincial Parliament Riau)***” Mar Syahid, 080920101009; 2011: pages: 147 Program Study Of Public Administration Major Of Adminstratif Science Social and Political Science Faculty University Jember

*With regional autonomy, the role of Parliament in fulfilling its oversight of local government will be autonomous and empowered. However, as a gathering place of representatives of political parties, Parliament in protecting the public interest sometimes still colored by the interests of many political parties, thus making less than optimal performance of Parliament.*

*In connection with the public interests and the interests of political parties that surround the parliament members, this research focuses on managing the dilemma between public interests and the interests of political parties. The observation was DPRD Riau Province. Techniques used to collect data are interviews, observation and documentation. To analyze the data using descriptive - qualitative.*

*Based on the findings in the field can be concluded that: (1) Fittings DPRD Riau province in general has been working in accordance with the basic tasks and functions. But there are some that are still less than optimal, ie Consultative Committee, Honorary Board, and Budget Committee; (2) implementation of oversight mechanisms DPRD Riau Province conducted in accordance with the agenda less, because there are several sometimes conflicting agendas. Implementation procedures is more admisnistratif implementation to the letter - the letter came in, and do not have standardized guidelines for the implementation of general oversight, (3) the ability of legislators Riau Province in articulating the public interest sometimes caused a lot of compulsion, because these problems have been intensively reported by the press or compelled by the public through demonstrations (demos), (4) the ability of legislators in articulating the interests of the Riau Province was good enough, because of coordination with the board factions and political parties. It's just the monitoring of these factions and political parties sometimes make the performance of board members rather slow, as the heart - the heart afraid of; (5) the ability of members of the DPRD Riau province in managing the dilemma between political party interests and public interests in general can be said enough. Board members capable of a higher priority to the interests over the interests of the group. Prioritize the interests of board members of public (state) interests above the interests of political parties and individuals. Generally they try to work in proportion, but there is also more emphasis on the interests political parties, absent when performing supervisory functions (working visit) because of the location / community rather than their constituents.*

**Key Words :***DPRD, Political Party Interes, Public Interes*

## PRAKATA

Puji syukur dipanjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini dengan judul : (dalam bahasa Indonesia) FUNGSI PENGAWASAN DPRD (Studi Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Antara Kepentingan Partai Politik dan Kepentingan Publik pada DPRD Provinsi Riau)” (dalam bahasa Inggris) *DPRD SUPERVISION FUNCTION (The Study Of Interest Conflic Management Between The Political Parties Interests and Public Interest In The Provincial Parliament Riau)*” yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains ( M.Si) pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Konsentrasi Administrasi dan Kebijakan Publik Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, penulis tidak lepas dari dorongan, bimbingan, bantuan dan doa dari semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Harijono, SE., SU. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Jember.
2. Prof. Drs.I Made Tirta, M.Sc.,Ph.D selaku Sekretaris Direktur Program Pascasarjana Universitas Jember.
3. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Prof. Dr. Kabul Santoso, M.S. selaku Ketua Program Studi Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, dan yang membimbingku menjadi orang yang bermanfaat bagi khalayak banyak.
5. Prof. Dr. Akhmad Khusyairi, M.A. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membimbing penulis dengan penuh kasabaran dan tanpa lelah serta memberikan dukungan, pencerahan dan motivasi dalam baik menyelesaikan tesis maupun masalah-masalah lainnya, dengan baik dan lancar.

6. Al – marhum, Dr. Akhmad Habibullah, M.S.i. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan tesis ini.
7. Drs. A. Kholiq Azhari, M.Si selaku Dosen Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa, dan harapanku menjadi pembimbing seterusnya, mengantarkanku menjadi orang yang bermanfaat bagi bangsa.
8. Seluruh Dosen dan segenap Civitas Academika Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
9. Bapak Kepala Kecamatan, Bapak Sekretaris Kecamatan beserta Staf Kecamatan wuluhan kabupaten jember
10. Ibu Retno, Ibu Syemim Achter, Bapak Kabul, Bapak Tofan, Bapak Totok, Danang, Waris, Ifan dan pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Tidak ada yang sempurna didunia ini, karena kesempurnaan hanya milik ALLAH AWT semata. Untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun terhadap penulisan tesis ini dan semoga semoga hal yang telah diberikan kepada penulis mendapat Ridho ALLAH SWT dan semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak. Amien Ya Robbal A'lamien.....

Jember, Februari 2011

Penulis,

## **ABSTRAK**

Oleh: Mar Syahid

Pembimbing Utama: Prof. Dr. A. Khusairi. MA

Dengan adanya otonomi daerah, peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Daerah akan semakin otonom dan berdaya. Namun, sebagai tempat berkumpulnya para wakil partai politik, DPRD dalam memperjuangkan kepentingan publik terkadang masih banyak diwarnai oleh kepentingan partai politik, sehingga membuat kinerja DPRD kurang optimal. Berkaitan dengan adanya kepentingan publik dan kepentingan partai politik yang melingkupi anggota DPRD, maka penelitian ini memfokuskan pada pengelolaan dilema antara kepentingan publik dan kepentingan partai politik. Lokasi penelitian adalah DPRD Provinsi Riau. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan deskriptif – kualitatif. Berdasarkan temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa : (1) Alat kelengkapan DPRD Provinsi Riau pada umumnya telah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Namun ada beberapa yang masih kurang optimal, yaitu Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, dan Panitia Anggaran; (2) Mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Provinsi Riau kurang sesuai dengan agenda, karena ada beberapa agenda yang kadang berbenturan. Prosedur pelaksanaan pelaksanaan lebih bersifat admistratif terhadap surat – surat masuk, dan belum memiliki pedoman yang baku untuk pelaksanaan pengawasan secara umum; (3) Kemampuan anggota DPRD Provinsi Riau dalam mengartikulasikan kepentingan publik terkadang banyak disebabkan keterpaksaan, karena masalah tersebut telah diberitakan secara intensif oleh pers atau didesak oleh publik melalui unjuk rasa (demo); (4) Kemampuan anggota DPRD Provinsi Riau dalam mengartikulasikan kepentingan sudah cukup baik, karena adanya koordinasi dengan pengurus fraksi dan parpol. Hanya saja adanya pengawasan dari fraksi dan parpol ini terkadang membuat kinerja anggota dewan agak lambat, karena hati – hati takut salah; (5) Kemampuan anggota DPRD Provinsi Riau dalam mengelola dilema antara kepentingan partai politik dan kepentingan publik secara umum dapat dikatakan cukup. Anggota dewan mampu mendahulukan kepentingan yang lebih tinggi di atas kepentingan kelompok. Anggota dewan mendahulukan kepentingan publik (negara) diatas kepentingan parpol dan kepentingan individu. Pada umumnya mereka berusaha bekerja secara proporsional, namun demikian ada juga yang lebih mementingkan kepentingan parpol, absen saat melakukan fungsi pengawasan (kunjungan kerja) karena lokasi/masyarakatnya bukan konstituennya.

*Kata kunci : DPRD, Kepentingan Publik, dan Kepentingan Partai Politik*

## **ABSTRACT**

By: Mar Syahid

Under Supervision of: Prof. Dr. A. Khusairi. MA

*With regional autonomy, the role of Parliament in fulfilling its oversight of local government will be autonomous and empowered. However, as a gathering place of representatives of political parties, Parliament in protecting the public interest sometimes still colored by the interests of many political parties, thus making less than optimal performance of Parliament. In connection with the public interests and the interests of political parties that surround the parliament members, this research focuses on managing the dilemma between public interests and the interests of political parties. The observation was DPRD Riau Province. Techniques used to collect data are interviews, observation and documentation. To analyze the data using descriptive - qualitative. Based on the findings in the field can be concluded that: (1) Fittings DPRD Riau province in general has been working in accordance with the basic tasks and functions. But there are some that are still less than optimal, ie Consultative Committee, Honorary Board, and Budget Committee; (2) implementation of oversight mechanisms DPRD Riau Province conducted in accordance with the agenda less, because there are several sometimes conflicting agendas. Implementation procedures is more administratif implementation to the letter - the letter came in, and do not have standardized guidelines for the implementation of general oversight, (3) the ability of legislators Riau Province in articulating the public interest sometimes caused a lot of compulsion, because these problems have been intensively reported by the press or compelled by the public through demonstrations (demos), (4) the ability of legislators in articulating the interests of the Riau Province was good enough, because of coordination with the board factions and political parties. It's just the monitoring of these factions and political parties sometimes make the performance of board members rather slow, as the heart - the heart afraid of; (5) the ability of members of the DPRD Riau province in managing the dilemma between political party interests and public interests in general can be said enough. Board members capable of a higher priority to the interests over the interests of the group. Prioritize the interests of board members of public (state) interests above the interests of political parties and individuals. Generally they try to work in proportion, but there is also more emphasis on the interests political parties, absent when performing supervisory functions (working visit) because of the location / community rather than their constituents.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PEMBIMBINGAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>SUMMARY</b> .....	viii
<b>PRAKATA</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	7
1.3. Maksud dan Kegunaan Penelitian .....	7
1.3.1 Maksud Penelitian .....	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
2.1. Kajian Teoritis .....	8
2.1.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) .....	8
2.1.2 Fungsi dan Peran DPRD Dalam Pengawasan .....	11
2.1.3 Kapasitas Fungsi Pengawasan DPRD .....	22
A. Konflik kepentingan.....	23
A. Kepentingan Partai Politik .....	25
B. Kepentingan Publik .....	26

2.1.4 Konsep Pengawasan .....	29
2.2. Kerangka Berfikir .....	33
2.3. Hasil Penelitian Terdahulu .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	40
3.2. Fokus Penelitian .....	41
3.3. Jenis Dan Sumber Data .....	42
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	43
3.5. Teknik Analisa Data .....	44
<b>BAB IV DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	46
4.1.1 Kondisi Geografis .....	46
4.1.2 Luas dan Batas Wilayah .....	50
4.2. Penduduk .....	54
4.3. Prasarana Jalan Perhubungan dan Sektor Kelistrikan .....	55
4.4. Gambaran Peta Kekuatan Politik di Provinsi Riau .....	67
<b>BAB V HASIL PENELITIAN, ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>71</b>
5.1. Profil DPRD dan Pelaksanaan Pengawasan .....	71
5.1.1 Alat Kelengkapan DPRD .....	71
5.1.2 Mekanisme dan Prosedur Pelaksanaan Pengawasan DPRD .....	86
5.2. Pengawasan DPRD dan Kepentingan Partai Politik .....	96
5.1.2 Keterlibatan Aktif Partai Politik dan Fraksi .....	96
1. Aktifitas Fraksi .....	96
2. Koordinasi Fraksi dan Parpol .....	102
5.2.2 Pelaksanaan Pengawasan dan Kebijakan Fraksi .....	106
1. Daya Tangkap Fraksi .....	106
2. Upaya Fraksi Dalam Melaksanakan Pengawasan .....	108
5.3. Pengawasan DPRD dan Kepentingan Publik .....	111
5.3.1 Tersedianya Ruang Bagi Masyarakat Menyampaikan Aspirasi... ..	112
1. Kepedulian Komisi Menanggapi Aspirasi masyarakat .....	112
2. Kepedulian DPRD Dalam Memperjuangkan Aspirasi Masya... ..	117

5.3.2 Daya Tanggap DPRD Terhadap Aspirasi Masyarakat .....	120
1. Upaya DPRD Menyampaikan Aspirasi Masyarakat .....	120
2. Upaya DPRD dalam Menanggapi pemberitaan pers .....	122
5.4. Pengelolaan Konflik Antara Kepentingan Partai politik dan Kepentingan Publik .....	124
5.4.1 Isu Publik Yang Diperhatikan Dan Diselesaikan DPRD .....	124
5.4.2 Kemampuan Implementasi Hak Anggota .....	134
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>146</b>
6.1. Kesimpulan .....	146
6.2. Saran .....	147
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	



## DAFTAR TABEL

- TABEL 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD
- TABEL 4.1 Keadaan Suhu Di Kota Pekanbaru *Temperature In Pekanbaru City* 2006 – 2009
- TABEL 4.2 Nama – Nama Ibukota dan Luas Wilayah Kabupaten/Kota
- TABEL 4.3 Penduduk Provinsi Riau menurut Kabupaten/Kota tahun 2008 – 2010
- TABEL 4.4 Panjang Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Masing-masing Kabupaten/Kota
- TABEL 4.5 Banyaknya Jembatan Berdasarkan Kontruksi Setiap Kabupaten/Kota
- TABEL 4.6 Panjang Jembatan Berdasarkan Kontruksi Masing-masing Kabupaten/Kota
- TABEL 4.7 Banyaknya Rumah Tangga Menggunakan Sumber Penerangan
- TABEL 4.8 Banyaknya Pembangkit, Kapasitas Terpasang dan Tenaga yang Dibangkitkan
- TABEL 5.1 Surat Masuk Masa Sidang II 2010

## **DAFTAR GABAR**

GAMBAR 1 Proses Fungsi Pengawasan

GAMBAR II Dilema Kepentingan Partai Politik dan Kepentingan Publik Yang harus dikelola Anggota DPRD Dalam menjalankan fungsi pengawasan